

Dinamika Pasivitas Politik: Preferensi-Preferensi Keterlibatan Politik Pekerja Rumah Tangga Migran pada Pemilihan Umum di Negara-Negara Penempatan

The Dynamics of Political Passivity: Political Engagement Preferences of Migrant Domestic Workers in Electoral Processes in Host Countries

Ayu Kusumastuti

Universitas Brawijaya
Jalan Veteran Nomor 1, Ketawanggede, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia

ayukusumastuti@ub.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 31 Juli 2024, direvisi 16 Oktober 2024, diputuskan diterima 31 Desember 2024

Abstract

The enactment of Election Law Number 7 of 2017 outlines the requirements for voters, including Indonesian citizens (WNI) residing within the territory of the Republic of Indonesia or abroad. Focusing on migrant domestic workers, this paper seeks to analyze the political participation and engagement of migrant domestic workers in the political contestation of their homeland. The potential for political passivity among these workers is highly likely due to the restrictive nature of transnational caregiving work. This condition limits their freedom to engage in activities outside their work sphere, including participation in national elections. However, at the same time, they are able to identify personal barriers they face as a consequence of not participating in elections. Migrant domestic workers exhibit the characteristics of monitorial citizens, individuals who monitor and respond to election-related information amidst restrictive work patterns, while also developing alternative forms of political participation outside of electoral processes.

Keywords: women, migrants, domestic workers, home country, elections, participation

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan tentang syarat pemilih yang meliputi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri. Dengan fokus pada pekerja rumah tangga (PRT) migran, tulisan ini berusaha untuk menganalisis partisipasi politik dan keterlibatan PRT migran dalam kontestasi politik tanah air. Potensi pasivitas politik yang dialami oleh para pekerja ini sangat mungkin terjadi karena proses kerja perawatan transnasional yang sangat mengikat. Hal ini menyebabkan PRT migran tidak memiliki kebebasan beraktivitas di luar ranah kerja, termasuk berpartisipasi dalam pemilu tanah air. Namun di saat bersamaan, mereka dapat mengenali hambatan-hambatan personal yang dialami sebagai konsekuensi tidak berpartisipasi dalam pemilu. PRT migran menunjukkan karakteristik *monitorial citizen*, yaitu individu yang memantau dan merespons informasi terkait pemilu di tengah pola kerja yang restriktif, sekaligus disertai mengembangkan alternatif partisipasi politik di luar partisipasi dalam pemilu.

Kata kunci: perempuan, migran, pekerja domestik, negara asal, pemilu, partisipasi

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemilu di luar negeri telah secara konsisten dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sejak dideklarasikannya kemerdekaan Indonesia. Sejak tahun 1955, pemerintah Indonesia melalui UU Pemilu Nomor 7 Tahun 1953 telah mengimplementasikan hak-hak warga negara Indonesia di luar negeri dalam memilih anggota-anggota legislatif (Wall 2007). Dibantu oleh kedutaan atau konsulat jenderal di masing-masing di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia, penyelenggaraan pemilu Indonesia di luar negeri berlangsung secara periodik.

Dalam prosesnya, berbagai perubahan terjadi dalam sistem politik Indonesia terutama setelah berakhirnya

era Orde Baru. Sejak tahun 2004, masyarakat dapat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung pada pemilu. Selain itu, penyelenggara pemilihan umum di luar negeri yang selama ini diimplementasikan oleh pihak kedutaan masing-masing negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Indonesia diubah dengan penyelenggara pemilu khusus untuk lebih independen yaitu PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri), yang dibentuk oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri dibentuk pertama kali sejak Reformasi 1998. Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2000, anggota KPU adalah anggota non-partisan partai.

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwaslu LN) bekerja sama membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). PPLN memiliki peran penting dalam melaksanakan tahapan pemilu di luar negeri terutama untuk pemutakhiran data pemilih luar negeri, penetapan penyelenggaraan dan penentuan lokasi tempat pemungutan suara (TPS), dan pemrosesan surat suara dengan metode pos atau kotak suara keliling. Adapun KPPSLN bertanggung jawab pada saat hari pemilihan suara pada TPS-TPS di luar negeri.

Dengan sejarah penyelenggaraan pemilu luar negeri yang berlangsung secara konsisten dengan pengaturan kelembagaan yang terstruktur dan sistematis, tentu harapannya pemilu luar negeri dapat berjalan sesuai dengan harapan semua pihak. Namun demikian, harapan ini tidak terlalu sesuai bagi para PRT migran. Kenyataannya aksesibilitas pemilu tanah air masih terbatas bagi para PRT dan ditambah lagi masih ditemui hambatan-hambatan dalam pola kerja PRT yang rentan dan sangat membatasi partisipasi mereka dalam pemilu.

Dengan mengambil perspektif *hyper-precarious labor* dan *political passivity*,—tulisan ini berusaha mengulas tatanan kerja perawatan transnasional yang bersifat eksploratif dan rentan yang dapat menghambat partisipasi mereka. Kondisi *hyper-precarious labor* meminimalkan hak-hak dasar pekerja migran termasuk kesejahteraannya (Lewis et al. 2014). PRT migran termasuk dalam *hyper-precarious labor* yakni sistem migrasi dan kerja yang menciptakan migrasi sementara dan mengikat kerja dengan persetujuan majikan (Piper 2022). Hal ini menyebabkan ruang gerak PRT migran terbatas tergantung pada pemberi kerja, termasuk dalam beraktivitas di luar lingkup kerjanya di sebuah rumah privat.

Dengan kondisi kerja di dalam rumah, bagi PRT migran dengan pengaturan *Live-in*, dapat membuat beban kerja bertambah dan potensi eksploitasi dapat mudah terjadi. Kondisi kerja yang terisolasi dan rentan inilah yang mengakumulasi kondisi pasifnya PRT migran terhadap aktivitas dan kebebasan dalam berinteraksi dengan dunia di luar lingkup kerjanya termasuk berpartisipasi dalam pemilu tanah air. Penyelenggaraan pemilu di luar negeri yang konsisten dilakukan dan terbentuknya kelembagaan yang terstruktur meliputi institusi-institusi penyelenggara dan pengawas masih belum mampu mengatasi hambatan-hambatan struktural PRT migran dalam pemilu tanah air. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini berusaha menjawab dua pertanyaan

penelitian. *Pertama*, bagaimana kondisi pekerja migran yang rentan membentuk preferensi pasivitas politik mereka? *Kedua*, bagaimana PRT migran menegosiasikan pasivitas politik menjadi keterlibatan politik dengan aktif memantau dan merespons informasi pemilu tanah air, di tengah kondisi kerja yang rentan, dan disertai mengembangkan partisipasi politik di luar partisipasi formal dalam pemilu?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tulisan ini adalah *narrative literature review* atau studi kepustakaan naratif. Studi kepustakaan naratif adalah menyoroti dan menyintesis literatur-literatur yang tersedia berkaitan dengan riset dan cenderung tidak ada aturan-aturan baku dalam penulisan studi ini (Gregory & Dennis 2018). Tujuan dari studi kepustakaan naratif adalah untuk menyimpulkan sebuah topik penelitian secara detail dengan interpretasinya dengan bukti-bukti penelitian pada sebuah topik yang cukup kompleks dan luas (Sukhera 2022). Lebih spesifik, tulisan ini akan menggunakan *a critical review narrative synthesis*, yaitu studi kepustakaan dengan lensa interpretatif yang dibentuk dari teori-teori terdahulu, telaah kritis, perspektif dari penelitian-penelitian terdahulu, dan dikombinasikan dengan proses interpretasi peneliti (Sukhera 2022).

Beberapa hal yang diperhatikan ketika menulis studi kepustakaan lensa interpretatif, yaitu mengidentifikasi literatur-literatur yang relevan dan signifikan dalam studi, mendiskusikan dan mengevaluasi literatur dengan struktur yang jelas, mengidentifikasi beberapa peneliti-peneliti yang telah mengerjakan studi sebelumnya, mengontekstualisasikan tujuan penelitian, memasukkan literatur-literatur yang bertentangan dengan hasil sintesis studi untuk mendialogkan lebih dalam, membuat poin-poin justifikasi hasil analisis secara logis, mendiskusikan fakta dan opini secara jelas, memasukkan literatur terbaru dalam proses telaah naratif secara kontinu, dan memasukkan referensi-referensi telaah naratif secara lengkap (Saunders & Rojon 2011).

Dalam tulisan ini, peneliti menggunakan beberapa proses kerja untuk melakukan telaah naratif kritis, yaitu mendefinisikan perspektif atau teori yang digunakan serta menggunakan lensa interpretatif dan dialogis peneliti untuk mendiskusikan hasilnya. Tahap ini digunakan sebagai langkah awal sebelum memulai studi empiris mengenai partisipasi pekerja rumah tangga (PRT) migran pada pemilu luar negeri. Adapun

perspektif yang digunakan adalah *hyper-precarity labor* dan *political passivity* sebagai lensa awal untuk menelaah studi ini. Konsep tersebut memperlihatkan kondisi PRT migran di luar negeri dan juga bagaimana mereka menavigasi partisipasi politik dalam situasi kerja yang sangat rentan.

Hyper-Precarity Labor dan Political Passivity

Hyper-precarity labour atau pekerja *hyper-precariat* adalah terminologi untuk mendefinisikan kondisi yang berjaln antara tenaga kerja yang diregulasi oleh pasar dan dikarakteristikkan dengan permintaan pemberi kerja bagi pekerja fleksibel dengan upah rendah. Dalam konteks migrasi, pekerja ini mendapati posisi yang rentan dengan kebijakan imigrasi yang sangat restriktif, menghilangkan hak-hak dasar pekerja migran, seperti hak-hak untuk tinggal permanen dan kesejahteraan kerja (Lewis et al. 2014). Dalam kondisi ini, pekerja berada dalam kondisi yang sangat rentan, sangat bergantung pada sistem kerja yang eksploitatif, serta lemah terhadap hukum, perlindungan kerja, hak-hak sosial, dan sipil (Zou 2015).

Kondisi PRT migran Indonesia di berbagai negara penempatan menunjukkan *hyper-precarity* yang serupa dan banyak proses migrasi pekerja di Asia diatur oleh sistem kerja temporal dengan ikatan dengan majikan (Piper 2022). Lebih lanjut, proses ini menunjukkan operasionalisasi proses *recruitment*, *remittances*, and *return* (Rs) yang telah menjadi diskusi kebijakan global mengenai migrasi dan pembangunan. Narasi besar ini menjadi justifikasi untuk terus melanggengkan proses rekrutmen PRT migran tanpa mempertimbangkan migrasi yang aman. Kondisi *precariat* pekerja migran perempuan diproduksi oleh *broker* atau perekrut, kapasitas migran, dan lembaga-lembaga migrasi yang secara aktif menstrukturkan kondisi formal dan informal secara dinamis membentuk pengalaman migrasi yang rentan (Wee et al. 2019).

Karakteristik kerentanan dari PRT migran adalah kondisi marginalisasi disebabkan oleh latar belakang migran berdasarkan gender, ras, kondisi sosial-ekonomi, status migrasi, ataupun asal negara. Kondisi marginal berkelindan dengan latar belakang migran dan "*use and discard migration regimes*" menyebabkan kondisi ketidakadilan yang juga membatasi mobilitas pekerja dalam lingkup kerjanya (Kaur-Gill & Dutta 2022). Umumnya, PRT Migran menghadapi kondisi rentan dengan kondisi terbatas, baik di negara tujuan maupun negara asal. Di negara tujuan, PRT migran rentan akan kondisi lingkup kerja yang tertutup,

minim akan pengakuan hak-hak kerja, kontrak kerja sementara, dan terbatas ataupun bahkan menghadapi ancaman deportasi dalam sistem imigrasi. Di negara asal, PRT migran menghadapi jeratan hutang sebelum migrasi dan mengalami permasalahan finansial ketika beradaptasi dengan mencari peluang mata pencaharian baru ketika pulang ke negara asal (Parreñas et al. 2019; Silvey & Parreñas 2020). Dalam proses kerja di negara tujuan, majikan juga memberlakukan '*soft violence*' untuk menegosiasikan relasi kuasa atas pekerja migran. Hal ini menghasilkan relasi yang tidak setara dan meneguhkan kuasa atas pekerja. Kondisi yang semakin menguatkan kerentanan pekerja migran perempuan (Parreñas et al. 2021).

Kondisi kerentanan PRT migran dapat berimplikasi pada perilaku pasif dalam menegosiasikan agensi atau preferensi individu. Karena struktur sosial yang sangat besar dan ekspansi dalam individual PRT migran, pekerja migran cenderung tidak memiliki pilihan untuk menentukan preferensi perilaku atau intensi, termasuk dalam urusan politik. Dengan kondisi kerja yang rentan, seperti terikat dengan majikan, terimbas relasi kuasa dengan majikan, institusi migran yang mendukung situasi yang rentan, dan kondisi *financial*, *time*, dan *jobs insecurity*, PRT migran mengorientasikan perilaku lebih banyak pada pemenuhan kebutuhan ekonomi daripada politik. Situasi ini berdampak pada potensi perilaku pasivitas politik. Hal ini berdampak pada relasi yang dalam antara kondisi *vulnerable* dan *passivity*. Meskipun menurut Garrau (2021), *vulnerable* dan *passivity* tidak selalu terkoneksi karena individu tetap memiliki otonomi atau kebebasan pada individu secara relasional meliputi keputusan seseorang, termasuk keputusan politik, terintegrasi dalam keputusan individu yang terkoneksi dengan relasi dan konteks sosial, membentuk keputusannya yang personal.

Political passivity atau pasivitas politik adalah hasil dari perilaku apatis. Perilaku ini disebabkan oleh proses alienasi politik yaitu perasaan ter'asing' terhadap politik. Bahkan proses dalam pasivitas politik ini tidak hanya terlihat dari perilaku apatis terhadap politik dan perasaan teralienasi, namun juga bagaimana kelompok marginal mengekspresikan kepentingan dan perilaku politik mereka (Dahl et al. 2018).

Partisipasi politik dan keterlibatan politik berkaitan dengan perasaan memiliki terhadap tempat dan rekognisi terhadap individual. Dalam konteks partisipasi pemuda migran, kelompok pemuda sebagai contoh ingin berpartisipasi dalam politik namun mereka tidak merasa mereka dapat membentuk keputusan politik

(Sime & Behrens 2023). Pasivitas politik dalam voting sering dilihat berkebalikan dari partisipasi politik. Beberapa argumentasi melihat ini berbahaya untuk demokrasi dan beberapa melihat ini bukan merupakan penurunan demokrasi, melainkan proses individu menjadi '*monitorial citizen*'. Dalam proses masyarakat *postmodern*, mereka tetap tertarik dengan politik namun cenderung menghindari bentuk-bentuk tradisional partisipasi politik seperti dalam pemilihan umum dan secara bersamaan membangun pola partisipasi politik baru serta tetap terinformasi dengan isu-isu politik sebagai *monitorial citizen* atau masyarakat yang selalu memonitor (Amnå & Ekman 2014). Keterlibatan pasif migran di Italia, sebagai contoh, berelasi dengan gender, pendidikan, dan usia. Migran juga terlibat dalam partisipasi dalam advokasi politik bersama serikat pekerja dalam merespons kondisi ekonomi dan tempat tinggal yang buruk (Ortensi & Riniolo 2020).

Sekilas dapat diketahui jika pasivitas politik adalah proses ketika individu tidak terlibat dalam proses dan keputusan politik disebabkan oleh proses alienasi, perasaan memiliki, rekognisi terhadap individu yang dapat membentuk perilaku, preferensi, dan ekspresi politik seseorang. Pasivitas politik ini bisa jadi merupakan bentuk baru partisipasi politik. Mereka tidak terlibat secara penuh dalam aktivitas politik tradisional, seperti dalam pemilihan umum, namun lebih kepada memonitor proses-proses politik yang terjadi dan membangun pola partisipasi baru di luar partisipasi politik formal.

Kondisi Kerja yang Rentan Berkaitan dengan Perilaku Pasif dalam Politik

Kondisi rentan atau *precariat* PRT migran Indonesia terjadi dalam lapisan-lapisan yang mencengkeram PRT migran, meninggalkan sedikit sumber daya baik waktu, uang, maupun psikologis, untuk dapat terlibat dalam politik tanah air. PRT migran distrukturkan untuk menjadi pekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang dengan tidak ada rekognisi terhadap hak-hak pekerja dan kesejahteraannya. Hal ini menunjukkan situasi *hyper-precarity* yang menunjukkan pekerja fleksibel, upah rendah, diatur oleh logika pasar yang liberal, rezim migrasi yang restriktif, tidak ada rekognisi atas hak-hak dasar pekerja, dan sistem kerja yang eksploitatif (Lewis et al. 2014; Zou 2015).

Dalam menganalisis kondisi *hyper-precarity* PRT migran Indonesia dan keputusan untuk berpartisipasi dalam pemilu tanah air, setidaknya ada dua preposisi yang mengungkapkan keterhubungan antara

keduanya. *Pertama*, kondisi *hyper-precarity* PRT migran berupa kondisi perekrutan migran yang eksploitatif menghasilkan *economic insecurity* bagi PRT Migran. PRT migran cenderung untuk mengalokasikan sumber daya waktu, uang, dan kapasitas sipil untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dibandingkan politik sehingga potensi pasivitas politik dapat terjadi. *Kedua*, kondisi *hyper-precarity* PRT migran dengan kondisi kerja terisolasi dalam relasi kuasa majikan menyulitkan pekerja migran mengakses informasi politik termasuk registrasi pemilih, pemilihan suara melalui pos, ataupun bepergian menuju lokasi tempat pemungutan suara. Hal ini dapat menyebabkan potensi menjadi *golput* (golongan putih) dapat terjadi karena hambatan struktural.

Struktur relasional adalah struktur yang berkaitan dengan migran mengembangkan interaksi relasional dengan agen perekrut PRT migran. Agen atau *broker* ini menjadi penting sebagai aktor untuk memberangkatkan PRT migran ke negara tujuan. Proses ini kerap sangat eksploitatif karena ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan menawarkan jasa perekrutan dengan biaya yang sangat tinggi. Hal inilah yang membuat migran harus mencari bantuan keuangan kepada keluarga atau lembaga keuangan lainnya dalam bentuk hutang. Jeratan hutang sebelum pemberangkatan menjadi hal lazim dalam proses perekrutan pekerja migran.

Proses jeratan hutang, *contract slavery*, dan *trafficking* menjadi pengalaman-pengalaman kerja migran dalam bentuk penyalahgunaan dan pemaksaan tenaga kerja (Johnson 2018). Rekrutmen PRT migran telah menjadi narasi besar untuk pihak-pihak terkait terus melanggengkan praktik ini dengan dalih pembangunan, yang sesungguhnya meneguhkan sistem kerja dengan hubungan kerja mengikat dengan majikan tanpa migrasi yang aman (Piper 2022). Proses ini juga beriringan dengan lembaga-lembaga migrasi dan intensi migran yang membentuk proses migrasi yang rentan (Wee et al. 2019). Kerentanan ini berlanjut hingga kepulangan PRT migran (*returner*) untuk mencari mata pencaharian baru di Indonesia pada saat isu *job insecurity* dan *economic insecurity* menjadi permasalahan utama (Parreñas et al. 2019; Silvey and Parreñas 2020).

Dalam proses ini, sumber daya PRT migran untuk berkontribusi dalam politik terutama pemilu tanah air terkendala karena sumber daya yang terkurasi pada *economic insecurity*. Berdasarkan *resource model of political participation*, seseorang dapat berpartisipasi

dalam politik jika memiliki kapasitas (*skills*) dan waktu (*time*) (Jeroense & Spierings 2023). Sumber daya berupa waktu menjadi hal penting di sini pada saat PRT migran memfokuskan waktu untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dibanding politik. Waktu, uang, dan kapasitas sipil adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam politik (Brady et al. 1995). Dengan kondisi *hyper-precarity* yang memaksa PRT migran mengalokasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kebutuhan ekonomi, maka aspek politik bukan menjadi perhatian utama mereka.

Terutama dalam proses kerja yang bersifat terisolasi, PRT migran sulit untuk berinteraksi dengan orang atau komunitas di luar lingkungan kerja mereka di rumah. Hal ini juga menyebabkan sulitnya akses informasi atau terpaan informasi politik mengenai elektoral politik tanah air. PRT migran mengalami marginalisasi dan eksploitasi melalui status pekerjaan yang bersifat sendiri, tertutup, dan terisolasi di dalam rumah yang bersifat privat, dengan proses marginalisasi yang lebih terlihat dibanding pekerja laki-laki (Kayako 2014). Dalam proses kerja bersifat tertutup, majikan mempraktikkan *'soft violence'* untuk menegosiasikan relasi kuasa atas pekerja migran (Parreñas et al. 2021). Hal ini menyebabkan PRT migran juga tidak bisa keluar rumah dengan bebas, termasuk ketika mereka juga membutuhkan keluar rumah untuk pergi menuju tempat pemungutan suara. Di Hong Kong, proses kerja PRT migran sangat tergantung pada majikan hingga dokumen paspor atau identitas lainnya sering kali dipegang oleh majikan ataupun agen tenaga kerja mereka. Hal ini yang menyulitkan mereka untuk menunjukkan identitas ketika akan memilih di tempat pemungutan suara (Asano 2019).

Kondisi ini sangat dimungkinkan PRT menjadi pasif terhadap isu politik tanah air. Terutama pada kontestasi elektoral politik, dengan kondisi tertutup, akses informasi dan aksesibilitas untuk berpartisipasi sangat terbatas. Pada pemilu 2024 di Malaysia, pemilih tidak mendapat cukup informasi mengenai alur pendaftaran pemilih, alur atau proses pemungutan suara, serta ketika menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara (Alhadjri 2024).

Melihat kondisi PRT migran yang terisolasi dan tertutup, artinya akses informasi menjadi kendala yang berarti untuk mereka dapat menyuarakan haknya dalam pemilu. Oleh karenanya, mereka dapat mengalami proses teralienasi atau *'asing'* terhadap politik tanah air. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya potensi pasivitas politik di antara PRT migran. Dahl et al.

(2018) mengungkapkan jika pasivitas politik disebabkan oleh proses alienasi politik, perasaan *'asing'* terhadap politik pada saat kecenderungan ini memperlihatkan perilaku apatis terhadap politik.

PRT migran juga bisa jadi merasa pelaksanaan pemilu tanah air menjadi bagian dari perhelatan hanya bagi kaum elite politik tanah air dan kontribusi PRT migran tidak terlalu mengubah kondisi politik yang ada saat ini. Keterlibatan politik berkaitan dengan perasaan memiliki dan rekognisi terhadap individual ketika perasaan tidak cukup membentuk keputusan politik dalam membentuk partisipasi politik (Sime & Behrens 2023). PRT migran mengakui jika mereka adalah bagian dari warga negara Indonesia sehingga memiliki perasaan memiliki dan kecintaan kepada tanah air. Namun demikian, dengan berjalannya waktu, pengalaman migrasi yang rentan juga dapat membentuk persepsi mereka tentang bagaimana fasilitas dan perlindungan migran yang aman oleh negara sulit untuk diwujudkan. Hal ini juga bisa memodifikasi keputusan politik PRT migran menjadi apatis terhadap pemilu.

Dahl et al. (2018) juga mengungkapkan bahwa *political passivity* atau pasivitas politik ini adalah bentuk ekspresi dan kepentingan politik seseorang. Sama halnya dengan PRT migran yang mengalami *hyper-precarity* dalam proses rekrutmen dan bekerja di negara tujuan, perilaku memilih mereka bisa jadi berpotensi menunjukkan perilaku apatis dalam politik. Kondisi rentan dan ketidakamanan finansial membuat sumber daya dan kapasitas PRT migran banyak tercurah untuk domain ekonomi dibanding politik. Absennya sumber daya ini membuat partisipasi mereka juga bisa jadi dapat sangat lemah. Ekspresi pasivitas politik PRT migran adalah ekspresi *hyper-precarity labor migration* PRT migran dalam hidupnya.

Perilaku Pasivitas Politik Tidak Selalu Menunjukkan Partisipasi Politik yang Melemah

Ekspresi pasivitas politik PRT migran dalam kontestasi elektoral tanah air bukan berarti mereka sama sekali tidak tertarik dengan isu politik, terutama dalam proses migrasi. PRT migran banyak belajar mengenai kebijakan tenaga kerja di negara penempatan. Sedikit banyak mereka mengidentifikasi proses-proses politik dan relasi kuasa yang bekerja serta berkelindan antara pekerja dan hukum tenaga kerja. Oleh karena itu, bisa jadi politik bukan barang baru bagi mereka.

Kondisi pasivitas politik PRT migran dalam pemilu di luar negeri ini juga diiringi dengan kondisi

kemauan untuk tetap ingin terinformasi dengan isu-isu politik tanah air. Mereka juga selalu memantau proses elektoral politik dalam rangka menyuarkan hak politik mereka. Upaya untuk terus memantau dalam proses pemilu dilakukan juga oleh PRT migran dari negara penempatan. Terutama bagi mereka yang memiliki waktu khusus semacam hari libur seperti di Hong Kong. Melalui telaah studi kepustakaan ini, diketahui jika proses untuk terus dapat terinformasi dengan informasi politik mengenai pemilu terlihat dengan munculnya opini-opini berasal dari PRT migran mengenai calon atau kandidat pemimpin, aksi-aksi untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilu, dan mengidentifikasi beberapa hambatan ketika melakukan pencoblosan di luar negeri.

Dalam kondisi kerja PRT yang rentan di negara tujuan, mereka juga mengembangkan kerja-kerja kolektif dalam bentuk advokasi dan pemberdayaan. Hal ini dilakukan dalam merespons minimnya pengakuan hak pekerja migran. Dengan tersedianya jaringan advokasi transnasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat bergerak di isu migran di negara tujuan misalnya, migran mulai mengenali tentang kesadaran hak-hak migran. Rekognisi atas sifat universalitas pengakuan hak-hak asasi manusia, termasuk hak pekerja migran untuk berpartisipasi secara inklusif dalam politik mengeskalasi kontribusi migran dalam politik.

Partisipasi ini untuk memastikan bahwa pekerja migran domestik juga memiliki hak yang sama dengan pekerja lain. Partisipasi ini berkembang dengan pola partisipasi bersifat laten seperti partisipasi dalam kelompok migran berdasarkan hobi atau kepentingan tertentu di negara tujuan maupun pola partisipasi bersifat manifes atau yang terwujud secara nyata misal berpartisipasi dalam serikat pekerja, anggota partai politik, ataupun mencoblos dalam pemilu tanah air. Menurut Ekman dan Amnå (2012), partisipasi politik memiliki beberapa tipe di antaranya partisipasi dalam bentuk laten berupa partisipasi sipil seseorang, kelompok masyarakat berdasarkan kepentingan, atau isu sosial politik tertentu sedangkan partisipasi manifes, yaitu partisipasi formal pemilu, demonstrasi, anggota partai politik, atau menandatangani petisi.

Partisipasi politik ini juga dilakukan oleh PRT migran sebagai perwujudan pengakuan hak politik migran. Partisipasi ini diharapkan dapat menjadi proses keterlibatan migran pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang diberlakukan pada migran itu sendiri. Dalam pemilu tanah air sendiri, PRT migran memiliki

harapan untuk calon terpilih dalam membentuk kebijakan perlindungan migran di negara tujuan.

PRT migran mampu memberikan opini-opini secara subjektif mengenai calon pemimpin Indonesia. Polarisasi dalam pemilihan calon presiden juga muncul di beberapa lokasi tempat penempatan PRT migran saat pemilu tahun 2014, ketika banyak PRT migran yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden. Kehadiran sosok Jokowi mampu menarik minat PRT migran untuk berpartisipasi pada pemilu dari negara penempatan. PRT migran menilai visi dan misi capres tersebut realistis dan solutif (Lestari 2014).

Pada pemilu 2024, muncul aksi-aksi di negara-negara penempatan PRT migran yang melakukan deklarasi mendukung salah satu pasangan sebagai bentuk mobilisasi politik dari luar negeri (Kusumastuti 2024). Dalam proses pencoblosan, PRT migran juga terlihat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu informasi mengenai proses registrasi daftar pemilih tetap tahun 2019 yang tidak jelas membuat PRT migran tidak memperoleh informasi yang cukup untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya (Straitstimes 2019).

Penentuan jadwal pemilihan umum yang tidak disesuaikan dengan kondisi hari libur di negara penempatan PRT juga menimbulkan masalah. Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Malaysia menetapkan hari libur Imlek sementara mayoritas PRT tetap bekerja. Akibatnya, mereka kemungkinan besar tidak mendapatkan hari libur. Di Singapura, pilihan menggunakan pos juga memberatkan karena mereka juga harus keluar rumah untuk pergi ke kantor pos dan majikan mereka belum tentu memberikan izin (Migrant CARE 2024).

Tantangan dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, seperti kurangnya sosialisasi dan pembatasan dalam situasi kerja, merupakan hasil penilaian PRT migran yang menyebabkan mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Meskipun dalam prosesnya, PRT migran cenderung tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, mereka tetap mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi hambatan-hambatan yang dihadapi sehingga memilih untuk tidak memilih adalah pilihan yang paling rasional bagi mereka. Alih-alih menjadi pemilih pasif, pasifnya PRT migran adalah bagian dari proses individu menemu-kenali, mengawasi, dan memantau proses penyelenggaraan pemilu di luar negeri dan mereka kemudian merefleksikan hambatan-hambatan yang dialami dari pengalamannya. Pasivitas

politik tidak selalu berbahaya bagi demokrasi, namun hal tersebut dapat melahirkan *monitorial citizen* yaitu pemilih yang memilih untuk menghindari bentuk-bentuk tradisional partisipasi politik seperti *voting* dan secara bersamaan membangun pola partisipasi politik baru serta tetap terinformasi dengan isu-isu politik (Amnå & Ekman 2014).

Monitorial citizen cenderung waspada dan siap merespons isu dalam pemilihan umum di tengah kesibukan mereka, terutama pada isu yang memengaruhi kehidupannya ketika isu personal menjadi isu *political* (Graves 2017). Sama halnya dengan PRT migran di negara tujuan, ketika musim pemilu hadir, mereka bisa jadi merefleksikan kinerja pemerintah dalam memberikan perlindungan pada mereka di negara tujuan dan dalam memberikan jaminan ketika menjadi Purna PRT migran. Hal ini menjadi upaya dari sikap reflektif yang memengaruhi kehidupannya sebagai PRT migran. Dalam studi kasus di negara-negara Nordik sebagai contoh, *monitorial citizen* cenderung untuk tidak berpartisipasi dalam institusi politik tradisional, seperti berpartisipasi dalam partai politik (Hooghe & Dejaeghere 2007). PRT migran dapat dikatakan tertarik dengan politik dengan merefleksikan pengalaman pribadi dan peran negara dalam melindungi pekerja migran di luar negeri. Proses tersebut memperlihatkan partisipasi politik dalam menyuarakan opininya. Proses partisipasi politik ini tidak selalu berkaitan dengan partisipasi dalam institusi politik secara legal dan formal.

Proses pemilu di luar negeri yang kompleks dan membutuhkan usaha yang cukup dari PRT migran untuk memahami prosesnya, membuat mereka secara cepat juga ingin memproses hasil pengetahuannya tentang pemilu. Munculnya permasalahan dalam pemilu bagi PRT migran, seperti sulitnya mendapat hari libur dan informasi yang terbatas menunjukkan PRT migran berupaya untuk lebih melihat dan mengidentifikasi secara cepat (*scanning*) tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara langsung ketika pemilu. Menurut van den Hoven (2005), *monitorial citizen* berusaha untuk meminimalkan biaya informasi terkait dengan proses kognitif mereka memproses informasi yang kompleks tentang politik karena pemilih cenderung melakukan identifikasi secara cepat daripada membaca lingkungan informasi mereka. Terutama dengan jarak dan kondisi cukup 'kedap suara' terhadap informasi pemilu, PRT migran menggunakan internet dan media sosial untuk mengetahui dan memantau situasi politik tanah air.

Salah satu ciri *monitorial citizen* lainnya adalah keterlibatan migran berpartisipasi dalam advokasi politik bersama serikat pekerja dalam merespons kondisi ekonomi dan tempat tinggal yang buruk (Ortensi & Riniolo 2020). Hal ini memperlihatkan bagaimana partisipasi politik mereka dapat melampaui partisipasi formal seperti partisipasi dalam serikat pekerja, dan hal tersebut merupakan upaya menghindari bentuk-bentuk tradisional dari partisipasi politik.

Keterlibatan PRT migran dalam advokasi hak-hak pekerja terlihat dalam partisipasi mereka mempromosikan advokasi UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sejak 2010 melalui Jala PRT (Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga). Selain itu, pekerja rumah tangga juga berpartisipasi dalam beberapa aktivitas sipil dan politik, seperti partisipasi dalam memperingati Hari Buruh, peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional, dan Internasional (Gastaldi et al. 2022).

Pada saat bersamaan, bentuk-bentuk partisipasi politik dalam bidang advokasi hak-hak pekerja migran juga banyak dilakukan di negara-negara penempatan. Di Hong Kong, terdapat lembaga-lembaga migran Indonesia yang menginisiasi Gerakan Menolak *Overcharging* oleh PILAR Hong Kong (Persatuan Buruh Migran Indonesia Tolak *Overcharging*) bekerja sama dengan dua puluh tiga organisasi migran dari berbagai macam latar belakang agama dan budaya (Rother 2017). Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) dan Migrant CARE berupaya untuk menerapkan *right based approach advocacy* bagi pekerja migran di Hong Kong dengan berbagai strategi yang bervariasi (Amalia 2020). PRT migran di Malaysia dalam naungan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat berhasil mendesak proses pemenuhan hak-hak dasar pekerja di negara penempatan, menunjukkan peran mereka sebagai anggota masyarakat transnasional (Khurun'in 2017).

Partisipasi politik yang dilakukan PRT migran bervariasi dari partisipasi formal dalam bentuk partisipasi dalam pemilu (*electoral politics*) hingga partisipasi dalam advokasi hak-hak pekerja migran dalam bentuk *extra-electoral politics* (Kusumastuti 2023). Partisipasi dalam pemilu oleh PRT dapat dilihat dari fenomena antrean pekerja di Kaifong Welfare Association, *polling station* di Tsim Sa Tsui, Hong Kong pada saat pemilu 2019 (Asano 2019) meskipun beberapa mengalami masalah dan tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Partisipasi dalam advokasi hak buruh di negara penempatan menunjukkan partisipasi sipil sebagai bagian dari masyarakat transnasional.

Dinamika pasivitas politik PRT migran dalam pemilu dapat berubah menjadi warga negara yang aktif dalam memantau pemilu dan mengakses informasi politik tanah air sebagai *monitorial citizen*. Proses ini terjadi ketika beberapa PRT migran mampu mengidentifikasi akar permasalahan dari absennya migran dari pemilu dan penggunaan hak pilih. Hal ini menunjukkan kapasitas mereka untuk menemukenali dan terinformasi dengan isu-isu politik tanah air. Dengan terus terinformasi inilah, kaum migran dapat mengembangkan kemampuan dialogis dan analisis di balik kecenderungan pasifnya sebagian dari mereka dalam pemilu di luar negeri. Terlebih lagi, PRT migran juga banyak mengembangkan partisipasi politik di luar lingkup partisipasi politik formal seperti pada pemilu. Dalam hal ini, mereka banyak mengembangkan partisipasi sipil dalam gerakan sosial mengadvokasi hak-hak pekerja migran.

Penutup

Dengan menyintesis literatur-literatur yang tersedia berkaitan kondisi PRT migran di negara tujuan dan partisipasi politiknya, telaah naratif ini menghasilkan 3 (tiga) temuan utama. *Pertama*, kondisi *hyper-precariat* dan kondisi kerja PRT migran yang terisolasi dapat membentuk kapasitas migran yang berfokus pada kebutuhan ekonomi dibanding politik, memperbesar kemungkinan untuk pasif terhadap politik tanah air. Namun, kondisi pasivitas politik itu tidak selalu mengancam proses demokrasi dan keterlibatan migran dalam politik tanah air.

Kedua, dengan upaya PRT migran mengidentifikasi permasalahan sulitnya PRT migran mengakses informasi politik atau menggunakan hak suaranya. Ini menunjukkan proses individu merefleksikan hambatan-hambatan struktural dalam pemilu. Refleksi ini adalah proses migran menunjukkan karakteristik *monitorial citizen*.

Ketiga, *monitorial citizen* menunjukkan preferensi-preferensi PRT migran dalam politik. Mereka dapat menemukan, mengenali, dan mengidentifikasi akar permasalahan yang dihadapi PRT migran, berupa alasan dan kecenderungan mereka menjadi pasif dalam kontestasi pemilu tanah air. *Monitorial citizen* ini berusaha untuk memantau informasi pemilu dan mengidentifikasi hambatan-hambatan personal pada kondisi kerja di luar negeri yang sangat restriktif namun tidak selalu berpartisipasi secara formal dalam pemilu. Mereka juga siap merespons isu dalam pemilihan

umum di tengah kesibukan mereka. Dalam proses ini, PRT migran juga mengembangkan alternatif partisipasi politik di luar partisipasi dalam pemilu, seperti advokasi UU perlindungan pekerja rumah tangga sejak 2010 di tanah air dan advokasi hak-hak pekerja migran di negara penempatan melalui serikat pekerja dan organisasi migran.

Kerentanan kondisi kerja yang dihadapi oleh PRT migran di negara-negara penempatan dapat membentuk potensi perilaku politik pasif dalam kontestasi pemilu tanah air. Namun pasivitas politik ini bersifat dinamis. Di balik perilaku *non-participation* dalam politik formal, PRT migran juga mampu mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural dalam pemilu tanah air yang membuat mereka menjadi pasif, sembari juga tetap terinformasi dengan perkembangan pemilu. Di sisi lain, PRT migran juga mengembangkan partisipasi politik di luar partisipasi politik formal seperti keterlibatan sipil dalam advokasi hak-hak pekerja migran.

Daftar Pustaka

- Alhadjri, A. 2024. 'Pemilu di Luar Negeri: Kesaksian WNI yang tidak bisa ikut memilih di Belanda dan 'saling dorong' di Malaysia – di mana letak kesalahannya?', *BBC News Indonesia*, 12 Februari 2024. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c84n3110lpmo>
- Amalia, E. 2020. 'Sustaining Transnational Activism between Indonesia and Hong Kong', *Asian and Pacific Migration Journal*, 29(1), hlm. 12—29.
- Amnå, E. & Ekman, J. 2014. 'Standby Citizens: Diverse Faces of Political Passivity', *European Political Science Review*, 6(2), hlm. 261—81.
- Asano, J. 2019. 'I can't Vote!': As Key Election Looms, Indonesians in Hong Kong Struggle to Cast their Ballot', *Hong Kong Free Press*.
- Brady, H. E., Verba, S., & Schlozman, K. L. 1995. 'Beyond SES: A Resource Model of Political Participation', *The American Political Science Review*, 89(2), hlm. 271.
- Dahl, V., et al. 2018. 'Apathy or Alienation? Political Passivity among Youths across Eight European Union Countries', *European Journal of Developmental Psychology*, 15(3), hlm. 284—301.
- Ekman, J. & Amnå, E. 2012. Political Participation and Civic Engagement: Towards a New Typology. *Human Affairs*. 22(3), hlm. 283—300.
- Garrau, M. 2021. 'Agency or Autonomy? Toward a Critical Theory of Vulnerability', *Genre, sexualité et société*, 25(25).
- Gastaldi, M., Jordhus-Lier, D., & Prabawati, D. 2022. 'Domestic Workers and their Struggle for Citizenship and Collective Identity in Indonesia', in Eric Hiariej and Kristian Stokke (eds.), *The Politics of Citizenship in Indonesia* (Singapore: Springer Nature Singapore), hlm. 115—132.

- Graves, L. 2017. 'The Monitorial Citizen in the "Democratic Recession"', *Journalism Studies*, 18(10), hlm. 1239—1250.
- Gregory, A. T. & Denniss, A. R. 2018. 'An Introduction to Writing Narrative and Systematic Reviews — Tasks, Tips and Traps for Aspiring Authors', *Heart, Lung and Circulation*, 27(7), hlm. 893—898.
- Hooghe, M. & DeJaeghere, Y. 2007. 'Does the 'Monitorial Citizen' Exist? An Empirical Investigation into the Occurrence of Postmodern Forms of Citizenship in the Nordic Countries', 30(2), hlm. 249—271.
- Jeroense, T. & Spierings, N. 2023. 'Political Participation Profiles', *West European Politics*, 46(1), hlm. 1—23.
- Johnson, M. 2018. 'From Victims of Trafficking to Freedom Fighters: Rethinking Migrant Domestic Workers in the Middle East', in Laura Brace and Julia O'Connell Davidson (eds.), *Revisiting Slavery and Antislavery: Towards a Critical Analysis* (Cham: Springer International Publishing), hlm. 179—205.
- Kaur-Gill, S. & Dutta, M. J. 2022. 'Hyper-Precarious Labor: Transnational Domestic Work', Oxford University Press.
- Kayako, U. 2014. 'Strategies of Resistance among Filipina and Indonesian Domestic Workers in Singapore', *Asian Women and Intimate Work* (Brill), hlm. 239—261.
- Khurun'in, I. 2017. 'Melintasi Batas Negara-Bangsa: Formasi Gerakan Perlindungan Hak Buruh Migran Domestik di Malaysia', *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(2), hlm. 181—192.
- Kusumastuti, A. 2023. 'Do Indonesian Migrant Domestic Workers Engage With Homeland Politicists?', *Global: Jurnal Politik Internasional*, 25(2), hlm. 164—199.
- Lestari, R. 2014. 'Coblosan di Hong Kong', *Coblosan di Hong Kong*.
- Lewis, H. et al. 2014. 'Hyper-precarious Lives: Migrants, Work and Forced Labour in the Global North', *Progress in Human Geography*, 39(5), hlm. 580—600.
- Migrant CARE. 2024. 'Catatan Awal Migrant CARE: Kerawanan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Luar Negeri, Ancaman Hak Terhadap Demokrasi Pekerja Migran Indonesia'. Jakarta: Migrant CARE.
- Ortensi, L. E. & Riniolo, V. 2020. 'Do Migrants Get Involved in Politics? Levels, Forms and Drivers of Migrant Political Participation in Italy', *Journal of International Migration and Integration*, 21(1), hlm. 133—153.
- Parreñas, R. S., Kantachote, K., & Silvey, R. 2021. 'Soft Violence: Migrant Domestic Worker Precarity and the Management of Unfree Labour in Singapore', *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 47(20), hlm. 4671—4687.
- Parreñas, R. S. et al. 2019. 'Serial Labor Migration: Precarity and Itinerancy among Filipino and Indonesian Domestic Workers', *International Migration Review*, 53(4), hlm. 1230—1258.
- Piper, N. 2022. 'Temporary Labour Migration in Asia: The Transnationality-precarity Nexus', *International Migration*, 60(4), hlm. 38—47.
- Rother, S. 2017. 'Indonesian Migrant Domestic Workers in Transnational Political Spaces: Agency, Gender Roles and Social Class Formation', *Journal of Ethnic Migration Studies*, 43(6), hlm. 956—973.
- Saunders, Mark N. K., & Rojon, C. 2011. 'On the Attributes of a Critical Literature Review', *Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice*, 4(2), hlm. 156—162.
- Silvey & Parreñas. 2020. 'Precarity Chains: Cycles of Domestic Worker Migration from Southeast Asia to the Middle East', *Journal of Ethnic Migration Studies*, 46(16), hlm. 3457—3471.
- Sime, D. & Behrens, S. 2023. 'Marginalized (non)citizens: Migrant Youth Political Engagement, Volunteering and Performative Citizenship in the Context of Brexit', *Ethnic and Racial Studies*, 46(7), hlm. 1502—1526.
- Sukhera, J. 2022. 'Narrative Reviews: Flexible, Rigorous, and Practical', *J Grad Med Educ*, 14(4), hlm. 414—417.
- Straitstimes. 2019. 'Some overseas Indonesia voters face problems with casting their ballots', *The straits time*, 11 April 2019. Retrieved from <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/some-overseas-indonesia-voters-face-problems-with-casting-their-ballots>
- van den Hoven, J. 2005. 'E-Democracy, E-Contestation, and the Monitorial Citizen*', *Ethics and Information Technology*, 7(2), hlm. 51—59.
- Wall, A. 2007. 'Indonesia: a Long-established System for External Voting at Diplomatic missions', in Andrew; Morales Ellis, Isabel; Gratschew, Maria; Braun, Nadja; Navarro, Carlos (ed.), *Voting from Abroad* (Sweden: International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance)), hlm. 53—55.
- Wee, K., Goh, C., & Yeoh, B. S. A. 2019. 'Chutes-and-ladders: the Migration Industry, Conditionality, and the Production of Precarity among Migrant Domestic Workers in Singapore', *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 45(14), hlm. 2672—2688.
- Zou, M. 2015. 'The Legal Construction of Hyper-Dependence and Hyper-Precarity in Migrant Work Relations', *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, hlm. 141—162.

